
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT DANA
PENSIUN YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN**

Leviana Rachel¹, Yuliana Risna Maengkom², Diana R.W. Napitupulu ³

^{1 2} Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia

Email: ¹leviana.office@gmail.com, ²yulianamaengkom@gmail.com,
³diana.napitupulu@uki.ac.id

Abstract

Sexual violence is a serious issue with widespread impacts on victims, affecting them physically. Pension beneficiaries are parties who have the right to receive timely payments as stipulated in the applicable regulations. Delays in the implementation of pension payments can have adverse consequences for beneficiaries, not only in terms of material losses, but also non-material losses, such as disruption in the fulfillment of daily financial needs that are mandatory. This research focuses on analyzing the forms of legal protection that have been available to pension fund beneficiaries who face the problem of late payments, as well as assessing the extent of the effectiveness of existing regulations in ensuring the fulfillment of their rights. The methods applied in this study include a normative legal approach combined with real case studies as concrete illustrations. A comprehensive analysis was carried out on various sets of laws and regulations related to pension funds, ranging from laws, government regulations, to policies issued by pension fund management institutions. Based on the results of the study, it was found that although the legal framework for the payment of pension funds has been designed, the application of sanctions against late payments still has significant weaknesses. Furthermore, the existing dispute resolution mechanisms show a tendency to take a long time, which ultimately worsens the conditions of the beneficiaries. From these findings, the study recommends revisions to existing regulations, including the drafting of additional rules that are stricter on the provision of sanctions, as well as efforts to improve efficiency in dispute resolution mechanisms. With stronger legal protections, it is hoped that the rights of pension fund beneficiaries can be better guaranteed, while the risk of late payments can be minimized in the future.

Keywords: Legal protection, Pension fund recipients, Laws and Regulations, Government Policy, Right to timely payment.

Abstrak

Penerima manfaat dana pensiun merupakan pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran dengan ketepatan waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran dana pensiun dapat berakibat buruk bagi penerima manfaat, tidak hanya dari segi kerugian material, tetapi juga kerugian non-material, seperti terganggunya pemenuhan kebutuhan finansial sehari-hari yang menjadi keharusan. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia bagi penerima manfaat dana pensiun yang menghadapi masalah keterlambatan pembayaran, serta menilai sejauh mana efektivitas regulasi yang telah ada dalam menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan studi kasus nyata sebagai ilustrasi konkret. Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dana pensiun, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dana pensiun. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum untuk pembayaran dana pensiun telah dirancang, penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran masih memiliki kelemahan yang signifikan. Lebih jauh lagi, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada menunjukkan kecenderungan untuk memakan waktu yang lama, yang pada akhirnya memperburuk kondisi para penerima manfaat. Dari temuan tersebut, penelitian merekomendasikan adanya revisi terhadap regulasi yang ada, termasuk penyusunan aturan tambahan yang lebih tegas mengenai pemberian sanksi, serta upaya peningkatan efisiensi dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, diharapkan hak-hak penerima manfaat dana pensiun dapat dijamin dengan lebih baik, sementara risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan di masa mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penerima dana pensiun, Peraturan Undang-undang, Kebijakan Pemerintah, Hak pembayaran tepat waktu.

A. Pendahuluan

Dana pensiun adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan menyediakan jaminan finansial bagi individu di masa pensiun agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi secara berkelanjutan¹. Penerima manfaat dana pensiun berhak menerima pembayaran tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena ketepatan waktu ini merupakan elemen penting dalam mendukung kesejahteraan mereka². Namun, dalam praktiknya, sering terjadi keterlambatan pembayaran dana pensiun yang menyebabkan berbagai kerugian bagi penerima manfaat. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak secara material, tetapi juga mencakup tekanan psikologis akibat ketidakpastian finansial³. Masalah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan regulasi yang seharusnya menjamin pembayaran tepat waktu. Keterlambatan pembayaran tidak hanya melemahkan kepercayaan penerima manfaat terhadap sistem dana pensiun, tetapi juga

menimbulkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama semakin memperburuk situasi yang dihadapi oleh penerima manfaat, yang seharusnya segera mendapatkan kepastian atas hak mereka⁴. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan yang tersedia bagi penerima manfaat dana pensiun serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang diterapkan, khususnya dalam menjamin pembayaran tepat waktu dan penyelesaian sengketa. Studi ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi agar dapat memastikan pemenuhan hak-hak penerima manfaat secara lebih baik dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran di masa mendatang⁵.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hukum bagi penerima manfaat dana pensiun yang mengalami keterlambatan pembayaran?

C. Hasil dan Pembahasan

Dana pensiun merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan finansial

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

² Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun.

³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Dana Pensiun di Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

bagi individu setelah masa kerja mereka berakhir. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan kesejahteraan penerima manfaat di masa pensiun, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Ketepatan waktu pembayaran dana pensiun menjadi elemen fundamental dalam menjaga keseimbangan finansial penerima manfaat dan mencegah timbulnya ketidakpastian ekonomi. Namun, dalam praktiknya keterlambatan pembayaran dana pensiun sering kali terjadi, menyebabkan berbagai dampak negatif, baik secara material maupun non-material kerugian material yang dialami penerima manfaat mencakup terganggunya pemenuhan kebutuhan mendesak seperti kebutuhan pokok atau biaya kesehatan, sementara kerugian non-material mencakup tekanan psikologis yang muncul akibat ketidakpastian finansial dan ketidakmampuan untuk mengakses dana tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan regulasi yang seharusnya memastikan hak penerima manfaat terlindungi secara optimal. ⁶Keterlambatan pembayaran dana pensiun adalah masalah yang dapat memberikan dampak negatif yang

signifikan bagi penerima manfaat. Dalam konteks ini, teori normatif menjadi relevan untuk memberikan gambaran ideal tentang bagaimana regulasi yang ada seharusnya dirancang dan diterapkan guna melindungi hak-hak penerima manfaat. Berdasarkan teori normatif, regulasi harus memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan bahwa terdapat mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran.⁷ Pada praktiknya, meskipun kerangka hukum sudah ada, keterlambatan pembayaran sering kali terjadi, menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan aturan. Ketidakmampuan untuk menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa yang sering kali membutuhkan waktu lama menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai. Meskipun terdapat regulasi yang secara teoretis telah memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan dana pensiun, dalam praktiknya kelemahan masih terjadi dalam beberapa aspek, yakni :

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Dana Pensiun di Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu.

⁷ Harahap, M. Y. (2019). *Teori dan Praktik Kepastian Hukum di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

- a. Kurangnya penegakan kewajiban pembayaran tepat waktu peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mengatur kewajiban pembayaran dana pensiun tepat waktu. Namun, implementasi aturan ini di lapangan tidak berjalan secara optimal. Lembaga pengelola dana pensiun sering kali tidak dapat mematuhi jadwal pembayaran, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan mekanisme penegakan hukum terhadap lembaga tersebut.
- b. Lemahnya sistem sanksi regulasi belum menyediakan mekanisme sanksi yang tegas dan efektif untuk menghukum lembaga pengelola yang gagal melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu. Akibatnya, lembaga tersebut tidak mendapatkan efek jera atas pelanggaran mereka, sehingga keterlambatan pembayaran terus terjadi.
- c. Proses penyelesaian sengketa yang tidak efisien mekanisme penyelesaian sengketa sering kali memakan waktu lama dan berbelit-belit, sehingga memperburuk situasi penerima manfaat yang telah terdampak oleh keterlambatan pembayaran. ketidakmampuan sistem untuk

menyediakan solusi yang cepat dan efisien bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi penerima manfaat.

Berdasarkan analisis, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk memperbaiki regulasi yang ada dan meningkatkan perlindungan hukum bagi penerima manfaat dana pensiun:

- a. Revisi Regulasi Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 perlu direvisi untuk mencakup Ketentuan sanksi administratif atau finansial yang tegas bagi lembaga pengelola yang terlambat membayar dana pensiun. Penambahan prosedur berbasis waktu dalam mekanisme penyelesaian sengketa.
- b. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap lembaga pengelola dana pensiun melalui audit berkala dan evaluasi kinerja untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.⁸
- c. Penyederhanaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mekanisme penyelesaian sengketa perlu disederhanakan, misalnya melalui pembentukan badan arbitrase khusus atau pemanfaatan teknologi untuk

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

mempercepat proses klaim. Hal ini akan memastikan penerima manfaat dapat memperoleh solusi dengan cepat.⁹

- d. Edukasi bagi Penerima Manfaat Penerima manfaat perlu diberdayakan dengan edukasi mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang dapat ditempuh jika terjadi keterlambatan pembayaran. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan mereka dalam memperjuangkan hak.

Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penerima manfaat dana pensiun, meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran, dan menciptakan sistem yang transparan serta adil.

D. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, keterlambatan pembayaran dana pensiun merupakan masalah yang merugikan penerima manfaat baik dari segi material maupun non-material, yang menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang ada. Regulasi saat ini belum mampu menjamin pembayaran tepat waktu dan penyelesaian sengketa secara efektif, sehingga menyebabkan kerugian bagi

penerima manfaat. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan, penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak-hak penerima manfaat. Dengan menggunakan pendekatan teori normatif, kepastian hukum, dan keadilan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa revisi regulasi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, dan penerapan sanksi yang tegas merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar Kementerian Keuangan, sebagai pengawas utama lembaga pengelola dana pensiun, melakukan revisi terhadap regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Revisi ini harus mencakup penambahan ketentuan sanksi yang tegas bagi lembaga yang gagal membayar tepat waktu dan pengaturan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memperkuat pengawasan terhadap operasional lembaga pengelola dana pensiun, termasuk melalui audit berkala dan evaluasi kinerja untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Saran juga ditujukan kepada lembaga pengelola dana pensiun agar meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan memberikan informasi yang jelas kepada penerima manfaat mengenai hak dan prosedur klaim. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerima manfaat

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan Mengenai Tata Kelola dan Sanksi Administratif pada Dana Pensiun*. Jakarta: OJK.

dana pensiun mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan hak mereka dapat terpenuhi secara optimal tanpa adanya keterlambatan

Daftar Pustaka

Harahap, M. Y. (2019). *Teori dan Praktik Kepastian Hukum di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Dana Pensiun di Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan Mengenai Tata Kelola dan Sanksi Administratif pada Dana Pensiun*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Tabungan Dana Pensiun*. Jakarta: OJK.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Dana Pensiun.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.